

IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN

Jhon Paul Elison, Jhony Fredy Hahury

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas **Kapuas**

Email : jf28hahury@gmail.com

Abstrak : Penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepala dalam pembangunan Desa Belonsat sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam berkomunikasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam program-program pemerintahan dan pembangunan dengan optimal. Disamping itu, sumberdaya manusia perangkat desa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaaa-pekerjaan dengan baik. Implementasi fungsi tersebut dengan komunikasi dan kerjasama juga melibatkan BPD dan masyarakat guna melaksanakan pembangunan desa yang dilakukan seperti jalan desa dan jembatan beton. Keterlibatan aktif masyarakat dalam hal pembangunan jalan desa dan pembuatan jembatan beton maupun sumbangan ide, menjadi tenaga kerja serta sumbangan uang.

Kata Kunci : Implementasi, Fungsi Kepala Desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam upaya mewujudkan keberdayaan masyarakat di bidang pembangunan merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan masyarakat desa. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kepada pemerintah daerah dituntut untuk membangun daerahnya sendiri tanpa menunggu program pembangunan dari pusat, yaitu pembangunan yang berakar dari bawah dimana semua kegiatan pembangunan itu ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan pembangunan yang demikian akan menjadikan masyarakat sebagai prioritas dan tujuan utama dari pembangunan.

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi fungsi kepala desa sangat penting dalam pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar keberlangsungan pembangunan pada tingkat desa tetap berjalan sesuai perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat agar pembangunan pun tetap sesuai dengan tujuan masyarakat.

Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya harus dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor pembangunan daerah sampai pada tingkat pedesaan menjadi perhatian khusus pemerintah karena desa merupakan mata rantai dalam sistem pemerintahan organisasi berada di bawah pemerintah kecamatan.

Menurut Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa :”Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Implementasi dari Undang-Undang tersebut dalam rangka memberikan jaminan kepada pelaksanaan pembangunan desa yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk didalamnya adalah pemerintah desa dalam membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri dan maju. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa. Pembangunan desa berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya.

Tuntutan kinerja sebagai kepala desa diharapkan bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program pembangunan desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tata kelola yang terbuka dan transparan. Oleh karena itu, fungsi kepala desa menjadi penting dalam menjalankan manajemen pembangunan desa secara efisien dan efektif guna meningkatkan tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya. Dengan demikian peran dari seorang kepala desa dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan publik. juga sangat berkaitan dengan kewenangan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut hasil prapenelitian yang dilakukan oleh penulis pada di Desa Belonsat Kecamatan Belimbing diketahui bahwa jumlah penduduk Desa berjumlah 1.505 dengan jumlah

439 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di dusun Sungai Apin, Sungai Ara, dan dusun Suka Maju. Dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya fungsi dan kinerja kepala desa dalam pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan visi misi pembangunan desa. Program pembangunan yang dilakukan adalah perbaikan jalan desa dan perbaikan sarana kantor desa.

Pelaksanaan program-program pembangunan tersebut semuanya bermuara pada peningkatan akses maupun kualitas hidup masyarakat khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Hal ini tentunya dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Belonsat Kecamatan Belimbing sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan desa yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera. Pemerintah desa dan masyarakat perlu harus bersinergi agar mendukung kerja-kerja pembangunan desa untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat sendiri.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Belonsat Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dengan berfokus pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut :Komunikasi, Sumberdaya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi kemampuan kepala desa dalam mengelola manajemen pemerintahan desa. Kepemimpinan Kepala desa diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk kelancaran kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pengertian implementasi dijelaskan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan padatercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan padatercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Winarno, 2002).

Implementasi fungsi kepala desa merupakan pelaksanaan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan implementasi fungsi kepala desa tersebut, apabila dilaksanakan dengan efektif maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Sebagaimana Tachjan dalam Atong (2018:46) secara etimologis “implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Kemudian apabila kata implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

Menurut Ndraha (1991:152) bahwa “kepaladesa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang”. Kepala desa tentunya juga berperan sebagai kepemimpinan yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, kepala desa berfungsi sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya yang mandiri, terbuka dan

akuntabel. Sementara Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Adapun tugas kepala desa disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat”.

Komunikasi dalam implementasi sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama, cukup sulit untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil. Penerapan adalah suatu proses yang tidak sederhana Udojidalam Solichin (1997:45) mengatakan dengan tegas bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip jika tidak diimplementasikan”. Komunikasi menurut Hunsaker (2007) “bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial, dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien”.

Selanjutnya komunikasi menurut Agustino (2006) dijelaskan bahwa, sebagai berikut:”merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik”. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo

kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Winarno (2005), “faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, kepentingan politik, sampai dengan adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan”.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait (Agustino, 2006).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan lebih banyak yang terlibat baik tenaga kerja maupun kemampuan organisasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan

kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Disamping itu, implementasi memerlukan sumberdaya manusia sebagai implementor untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, menurut Widodo (2011) Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*staff*) implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran (*budgetary*). Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*). Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*information and authority*). Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

Menurut Grindle dalam Widodo (2011), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

1. Variabel isi kebijakan. Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2. Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan uraian di atas maka, sumberdaya dalam implementasi fungsi kepala desa dalam pembangunan sangat penting guna merealisasikan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi fungsi kepala desa pada dasarnya merupakan implementasi yang dilakukan dengan melihat kepada program-program pembangunan yang ditentukan sesuai dengan kearifan lokal.

Mengubah paradigma bahwa membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan, melainkan lebih kepada bagaimana memosisikan program pembangunan sebagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai tugas pekerjaan yang di tangannya (Nawawi, 2009:138).

Implementasi fungsi kepala desa ditunjang melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal.

Hal ini sejalan Tjokroamidjojo (1998:24) menyebutkan bahwa “partisipasi dalam pembangunan merupakan upaya yang penting, karena akan menghasilkan pembangunan yang sangat memuaskan”. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa berjalan efektif dan berhasil dengan baik apabila masyarakat tersebut terlibat langsung dalam seluruh proses kegiatan yaitu : (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil, (4) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi, (5) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan peluang kegiatan usaha (Tjokroamidjojo, 1998).

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropoetro (dalam Lugiarti, 2004:7) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan

kelompok untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wibisono (2009:41) bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan dimulai dari tingkat paling awal yaitu perencanaan hingga kegiatan tersebut selesai dan pemanfaatannya dirasakan bersama sama oleh masyarakat. Partisipasi sendiri tidak terbatas pada kegiatan fisik atau pemberian dana namun juga menjaga mengelola dan mempertahankan apa yang sudah masyarakat capai dari suatu kegiatan yang diselenggarakan.

Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki penan penting. Menurut Adisasmita (2006:36-37) pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan dikarenakan anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka seperti: (1) Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya, (2) Mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, (3) Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi

masyarakat, (4) Mereka mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, (4) anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Suriana (2009) keuntungan dari partisipasi masyarakat yaitu: a) Memperluas basis pengetahuan representasi; b) Membantu terbangunnya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan diantara para stakeholders; c) Meningkatkan pendekatan iterative dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal; d) Mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas; e) Membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka faktor penting diinginkan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yaitu turut serta mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa juga tidak terlepas dari beberapa prinsip dasar sebagai cara yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Marzali (2003:17) bahwa tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

1) *Learning process (learning by doing)*; proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2) *Institutional development*; melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tamping dan daya dukung sosial.

3) *Participatory*; cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali *needs* yang ada dalam masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan ada dalam beberapa bentuk. Sebagaimana Slamet (2003:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu:

1. Partisipasi didalam tahap perencanaan Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.

2. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan Partisipasi dalam tahap pelaksanaan Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi didalam tahap pemanfaatan Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Dengan demikian, peran serta masyarakat kedepannya bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah, ataupun lembaga-lembaga non pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini bila dikaitkan konsep pembangunan sebagaimana yang dijelaskan oleh Kartasasmita (dalam Bratakusumah, 2005:17)

yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan dan partisipasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Selanjutnya partisipasi menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000:41) menyatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses dan membagi partisipasi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Partisipasi inisiasi (*inisiation participation*), yaitu partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, atau dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

2. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*), yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.

3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*), yaitu partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jayadinata (1999:13) pengelolaan pembangunan akan jauh lebih baik, jika sejak awal sudah melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Karena hasilnya akan dapat sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya, dan kemampuan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat

penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sehubungan dengan hal ini, maka berkaitan dengan implementasi fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Belonsat Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi begitu penting dan untuk memudahkan perencanaan dalam pelaksanaan program-program pembangunan fisik yang berkaitan dengan kepentingan penduduk. Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa bahwa komunikasi merupakan hal yang istimewa apabila dengan baik dan sebagai sarana untuk bertukar pendapat serta membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara seluruh perangkat desa. Berkomunikasi dengan baik dapat memudahkan setiap pekerjaan yang dikerjakan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Fungsi dari komunikasi untuk mengintegrasikan berbagai pemikiran individu untuk agar memperoleh pesan serta informasi yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam setiap pandangan yang disampaikan. Hal tersebut dalam untuk memudahkan dan mencairkan pendapat diantara perangkat desa.

Komunikasi memudahkan Informasi yang diterima harus jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar perangkat desa dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Dengan demikian, komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia, berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi etika komunikasi sebagai prinsip dalam hubungan interaksi antar individu dan kelompok sehingga etika tersebut dapat menjadi nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Fungsi dan kewenangan pemerintah desa bukan hanya dalam pembangunan saja namun pemberian pelayanan kepada masyarakat baik harus memenuhi kepentingan masyarakat. Komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus diikuti dengan komunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pembangunan fisik desa. Pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan komunikasi, seperti komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengerjakan pembangunan kantor desa dan gedung serbaguna. Hal inilah diperlukan komunikasi agar penting untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan desa. Integrasi antara kepala desa dan perangkat desa serta BPD yang satu dan yang lain sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komunikasi yang baik sangat diharapkan agar dapat mewujudkan sukses program-program pembangunan yang dilaksanakan. Artinya fungsi kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pemerintahan desa sangat diperlukan komunikasi yang baik yang bisa menyatukan pemikiran dari semua perangkat desa yang ada. Dalam komunikasi yang dilakukan kepala desa sudah baik karena diikuti dengan keterbukaan kepada semua perangkat desa maupun semua anggota BPD. Seperti yang dilakukan kepala desa dengan mengundang anggota BPD dan beberapa tokoh masyarakat dalam berkoordinasi dalam hal pembangunan kantor desa belonsat yang baru maupun pembangunan jalan beton.

Berdasarkan uraian di atas, Komunikasi diperlukan oleh setiap perangkat desa maupun seluruh anggota BPD dalam hal merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan selalu berkomunikasi secara terbuka untuk mendengarkan saran dan masukan agar mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi kepala desa dalam komunikasi sudah baik sehingga diperlukan dukungan dan komitmen dari semua perangkat desa dan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi. Salah satu tujuan melakukan komunikasi untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Komunikasi sebagai indikator utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan kinerja kepala desa yang optimal. Komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dan seluruh perangkat desa maupun BPD agar tetap responsif terhadap setiap masalah yang ada di masyarakat. Kegunaan komunikasi agar menghindari kesalah fahaman komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa memerlukan komunikasi terkait dengan menyelesaikan masalah apapun yang ada di masyarakat. Komunikasi akan menjadi efektif apabila dilakukan dengan secara terbuka dan bertanggung jawab. Komunikasi sebagai usaha menyampaikan pesan kepada penerima pesan agar informasi yang diterima dapat memuaskan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik dan komunikasi menjadi penting dalam rangka mengefektifkan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan desa. Pentingnya komunikasi tentunya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa terhadap program-program pemerintahan dan. Sementara kendala komunikasi yang sering terjadi oleh perangkat desa adalah biasanya perdebatan atau tukar pendapat antara perangkat satu dengan yang lain. Perdebatan yang terjadi dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan tetap saling menghargai antar perangkat desa sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pertukaran pendapat itu akan lebih baik apabila adanya kejujuran dan keterbukaan informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan harus diikuti dengan persepsi yang positif oleh semua perangkat desa yang ada. Setiap perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau perangkat desa dalam masyarakat harus sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi seseorang. Oleh karena itu, hubungan dalam pekerjaan yang baik antar individu, kelompok dalam organisasi pemerintahan desa harus diikuti dengan komunikasi yang baik pula dengan mengedepankan komunikasi yang santun.

Sumberdaya Manusia

Perangkat desa sebagai unsur pemerintahan harus memiliki kompetensi dalam mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Dengan adanya kompetensi dan kualitas perangkat desa yang baik maka akan menunjang kinerja pemerintah desa. Sumberdaya manusia diperlukan dalam implementasi program yang ditetapkan menjadi penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, sumberdaya manusia perangkat desa harus memiliki motivasi kerja yang tinggi agar dapat bekerja dengan semangat serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berkaitan dengan motivasi, motivasi sebagai kebutuhan yang akan mendorong perangkat desa untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang menghasilkan hasil yang lebih optimal. Tujuan yang dihasilkan sebagai penyemangat bagi perangkat desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai bagian dari pemerintahan desa. Tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Motivasi sebagai pemberian spirit agar seseorang bertindak dan berusaha untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan.

Sumberdaya manusia mempunyai peran dalam implementasi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Artinya keberhasilan implementasi fungsi kepala desa dalam pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan kepala desa dan jajarannya untuk bekerja dan meningkatkan kinerja sebagai bagian dari tanggung jawab yang sudah melekat. Oleh karena sumberdaya manusia harus diikuti dengan kesungguhan dan motivasi kerja dari semua perangkat desa yang ada agar tujuan dapat tercapai.

Implementasi program pembangunan desa harus secara konsisten dijalankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan diperlukan dalam implementasi program pembangunan. Fungsi kepala desa dan perangkatnya harus didorong sebagai agar kemampuan pekerjaan sesuai dengan peran dan kewajibannya bisa diselesaikan. Kemampuan pengetahuan diperlukan agar semua perangkat

desa termasuk anggota BPD agar dapat memahami tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Desa harus memiliki tanggung jawab yang besar agar memberikan motivasi kepada perangkat desa. Motivasi diperlukan karena dapat memberikan semangat untuk mendorong menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan motivasi kerja yang dimiliki oleh perangkat desa tentunya dalam rangka membantu melakukan pekerjaan dengan maksimal. Motivasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan tentunya harus dimiliki visi dan tujuan kerja yang jelas dan terarah agar memenuhi kepentingan masyarakat.

Fungsi kepala desa dilakukan dengan baik hal ini terlihat dari kemampuan kerja-kerja pemerintahan desa seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, jembatan beton dan gedung kantor desa baru serta pelayanan administrasi. Dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kepala desa menunjukkan bahwa peran dan fungsi dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan kepala desa banyak melakukan komunikasi dengan perangkat desa lain dalam bekerjasama untuk menyelesaikan setiap program-program desa atau masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tentunya bukan hanya dikerjakan oleh kepala desa namun didukung oleh oleh perangkat desa yang lain dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Implementasinya bahwa perangkat desa memiliki peran penting membantu kepala desa untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, seperti membuat laporan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, sumberdaya manusia perangkat desa harus didukung sehingga dalam menggerakkan kerja-kerja program desa dapat berjalan dengan baik. Sumberdaya manusia masih kurang pada Pemerintahan Desa Belonsat karena jumlahnya hanya 6 orang. Dengan melihat kondisi perangkat desa tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa bahwa dengan kekurangan ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk 1.505 jiwa. Pengembangan sumberdaya manusia perangkat desa diharapkan kedepan ditambahkan lagi agar menunjang kinerja pemerintah desa yang lebih optimal.

Dalam hal dukungan sumberdaya manusia perangkat desa, bahwa penambahan perangkat desa penting dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Desa Belonsat. Sehingga diharapkan pengembangan dan pembinaan perangkat desa dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang mampu bekerja secara baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif maupun pelayanan kepada masyarakat. Sumberdaya manusia perangkat desa menjadi penggerak utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan merupakan tujuan utama dalam melayani masyarakat serta dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Kualitas perangkat desa juga sangat penting dengan motivasi untuk menambah pengetahuan secara individu terutama berkaitan dengan membentuk karakter perangkat desa dengan komitmen serta bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa bahwa secara aspek pendidikan sumberdaya manusia perangkat desa sudah baik dengan berpendidikan sarjana (S1) dan sekolah menengah atas (SMA). Dengan pendidikan perangkat desa yang dimiliki tentunya kualitas dan kemampuan perangkat desa dapat merencanakan, melaksanakan dan mengelola pekerjaan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dengan baik. Sementara untuk perangkat desa harus ditambahkan agar menunjang kinerja pemerintah desa. Karena jumlah kuantitatif sumberdaya perangkat desa hanya berjumlah enam orang.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sangat diperlukan sebagai tujuan utama dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi memiliki arti penting guna membangun pembangunan desa dengan berlandaskan pada nilai-nilai partisipatif maupun nilai-nilai kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan membangun desa sangat antusias di Desa Belonsat dengan semangat serta keinginan agar desa lebih berkembang dan maju. Sementara menurut Ketua BPD Belonsat diutarakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan desa pada kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dengan menjadi tenaga kerja serta ikut menggalang dana dengan pemberian uang tunai.

Partisipasi masyarakat tentunya penting dalam mendorong masyarakat agar turut aktif dalam setiap kegiatan agar masyarakat lebih mengerti makna keterbukaan dalam pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat desa mendapat respon yang baik dengan rasa kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini seperti yang dilakukan masyarakat dengan sendiri swadaya menggalang dana dan ikut terlibat bekerja sebagaimana partisipasi warga membangun jalan poros desa dan jembatan beton. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa dan anggota BPD sangat berperan penting agar mampu merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai kepentingan masyarakat.

Masyarakat yang terlibat langsung terhadap pembangunan di desa sebagai rasa empati dan kepedulian kepada kegiatan-kegiatan serta bakti sosial yang dilakukan warga di desa. Ini sebagai bentuk komitmen masyarakat dan Pemerintah Desa Belonsat memberikan kesempatan bagi masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga masyarakat juga merasakan bahwa pembangunan itu milik masyarakat. Mengacu kepada partisipasi masyarakat menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa dijelaskan bahwa pelibatan masyarakat di desa sudah baik dengan terlibat langsung memberikan saran dan masukan kepada BPD dan Pihak desa tentang pembangunan yang dilaksanakan harus diketahui oleh warga desa.

Diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembuatan jalan desa, jembatan beton dan bakti sosial yang dilakukan oleh warga. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan tersebut sudah tentu dapat menambah semangat pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa perlu dijaga serta dibina secara keberlanjutan, dikarenakan partisipasi akan meningkatkan hubungan serta kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah dan BPD yang nantinya akan membawa perubahan pada masyarakat desa itu sendiri.

Tidak semua masyarakat mudah aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, namun harus perlu sosialisasi kepada masyarakat agar bisa terlibat seperti kerja bakti dan sumbangan pikiran, barang maupun sumbangan uang. Hal ini akan menjadi kendala bagi warga masyarakat kalau tidak dilakukan sosialisasi dengan baik oleh Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini diperkuat dengan dengan informasi Kepala Desa bahwa kendala dalam partisipasi masyarakat adalah belum semua warga terlibat dalam kegiatan pembangunan desa dikarenakan sebagian warga masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat desa sebagian besar bermata pencaharian petani dan dari aspek pendidikan masyarakat masih rendah.

Partisipasi masyarakat secara efektif dilakukan akan menghasilkan partisipasi yang didasarkan atas komitmen masyarakat dan sebagai modal dalam percepatan pembangunan desa. Pembangunan Desa diperlukan adanya keserasian dalam kegiatan agar dapat mengundang minat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kerja pembangunan yang dilaksanakan, sehingga mereka dapat merasakan bahwa pembangunan itu memang perlu bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dalam hal ini harus lebih aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa semuanya tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian yang dideskripsikan sebelumnya, menunjukkan bahwa partisipasi yang efektif akan menciptakan suatu umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa, sebab partisipasi merupakan kunci pemberdayaan

dan kemandirian masyarakat serta merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat yakni sebagian warga masyarakat masih sibuk dengan kesibukan dan pekerjaan masing-masing. Waktu yang terkadang tidak bisa memaksakan semua kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah timbulnya sikap-sikap apatis warga yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut: komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perangkat desa dengan warga berdiskusi untuk membahas rencana-rencana yang dikerjakan. Sumberdaya manusia dalam implementasi melibatkan perangkat desa dan keterlibatan warga dalam hal pembangunan fisik maupun sumbangan ide, menjadi tenaga kerja serta sumbangan uang serta kerja bakti. Kendala yang dihadapi yaitu masih sebagian warga sibuk waktu pekerjaan dan kurangnya kesadaran masyarakat serta belum termotivasi ikut partisipasi dalam program pembangunan desa. Oleh karena itu saran dalam penelitian ini adalah komunikasi yang sudah berjalan dapat lebih dimaksimalkan agar kedepannya dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif serta didukung sumberdaya perangkat desa dan keterlibatan warga yang efektif agar pembangunan fisik berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pondok
- Atong, Petrus, 2018. *Pemikiran Kontemporer Analisa Administrasi dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Komunikasi di Era Pelayanan Publik*. Malang : IRDH.
- Agustino Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amirin, 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arief, Budiman, 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bratakusumah, S. Deddy, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi, Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cook Hunsaker, 2007. *Management and Organizational*. Jakarta : GramediaPustaka
- Jayadinata, T, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : ITB Press.
- Lugiarti, 2004. *Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong Lexy, J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong*. Yogyakarta: LKIS.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis*. Surabaya: ITSPers.
- Ndraha, Taliziduhu, 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

- Rukmana, N. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Subari, 1998. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta : BPF E.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Solichin, Abdul Wahab, 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Depdiknas.
- Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo. 1998. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Usman Sunyoto, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPresindo.